

PERGULATAN ANTARA EKONOMI DAN POLITIK DALAM PERSPEKTIF *PUBLIC CHOICE*

Karjuni Dt. Maani

Prodi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang
dtmaani@yahoo.com

ABSTRACT

Separation between economics and political science have long lasted so they are not able to provide the same conclusion about the analyzed object. Economics only examine market institutional aspects without touching nonmarket social institutions. Instead of political science is very poor framework for seeing the phenomenon of economic analysis on the basis of market institutions. Public choice perspective has become a bridge that can analyze problems outside the framework of the analysis, which is based on the phenomenon of the market. This is what allows the return encounter in economics and politics in a region so that the analysis of the development of social sciences in the future is no longer compartmentalized in strict discipline, not mutually exclusive and mutually reinforce with each other. As a result of this separation of science, the social sciences experienced a major crisis due to many new phenomena, which can not be captured perfectly by the two groups of scientists.

Keywords: *Economics, politics, perspective, public choice.*

ABSTRAK

Keterpisahan antara ilmu ekonomi dan ilmu politik telah berlangsung lama sehingga keduanya tidak mampu memberikan kesimpulan yang sama tentang objek yang ditelaah. Ilmu ekonomi hanya menelaah aspek kelembagaan pasar tanpa menyentuh kelembagaan sosial nonpasar. Sebaliknya ilmu politik sangat miskin kerangka analisisnya untuk melihat fenomena ekonomi atas dasar institusi pasar. Perspektif public choice sebagai jembatan yang bisa menganalisis masalah di luar kerangka analisis yang bertumpu pada fenomena pasar. Inilah yang memungkinkan pertemuan kembali bidang ekonomi dan politik dalam suatu wilayah analisis sehingga perkembangan ilmu-ilmu sosial di masa mendatang tidak lagi tersekat dalam kotak-kotak disiplin ilmu yang ketat, saling menafikan dan tidak saling menguatkan satu sama lain. Akibat keterpisahan ilmu ini, maka ilmu sosial mengalami krisis besar karena banyak fenomena baru, yang tidak bisa ditangkap secara sempurna oleh kedua kelompok ilmuwan tersebut.

Kata Kunci: *Ekonomi, politik, perspektif, public choice.*

A. Pendahuluan

Secara sistematis ilmu ekonomi dan ilmu politik di dalam sejarah perjalanannya semakin terpisah dan menjauh satu sama lain. Masing-

masing pihak yang diwakili ahli ilmu ekonomi dan ahli ilmu politik, melakukan penalaran dan pencarian teori dengan pendekatan yang

berbeda, sehingga bermuara pada bentuk paradigma ilmu dan keluaran yang berlainan. Satu sama lain saling tidak bertemu sehingga kedua kelompok ilmuwan tersebut membahas masalah yang sama sekalipun, hasilnya jauh berbeda dan sulit diperbandingkan.

Fakta dan perkembangan ini menunjukkan bahwa bagian-bagian ilmu sosial saling menjauh satu sama lain karena fokus perhatian dan kerangka analisis yang makin spesifik. Ilmu-ilmu sosial dengan berbagai cabangnya, termasuk ilmu ekonomi, berbeda secara terkotak-kotak sehingga sulit mencapai titik temu, meskipun ada kesamaan objek dan subjek yang ditelaah. Ilmu ekonomi misalnya hanya menelaah aspek kelembagaan pasar dari berbagai fenomena sehingga tidak bisa menyentuh kelembagaan sosial yang bukan pasar. Sebaliknya, ilmu politik dan ilmu sosial lainnya sangat miskin kerangka analisis untuk melihat ekonomi, yang didasarkan pada institusi pasar.

Keterpisahan antara ilmu ekonomi dan ilmu politik telah berlangsung lama sehingga keduanya tidak mampu memberikan kesimpulan yang sama tentang objek yang ditelaah. Perspektif *public choice* menjembatani antara ekonomi dan politik yang bisa menganalisis masalah di luar kerangka analisis yang bertumpu pada fenomena pasar. Inilah yang memungkinkan pertemuan kembali bidang ekonomi dan politik dalam suatu wilayah analisis sehingga perkembangan ilmu-ilmu sosial di masa mendatang tidak lagi tersekat dalam kotak-kotak disiplin ilmu yang ketat, saling menafikan dan

tidak saling menguatkan satu sama lain.

Sekarang, apa yang dimaksud dengan teori *public choice*? Menurut Staniland¹, teori *public choice* (pilihan publik) adalah salah satu cabang ilmu ekonomi yang mempelajari bagaimana pemerintah membuat keputusan yang terkait dengan kepentingan publik (masyarakat). Lebih jelas, Staniland mendefinisikan teori *public choice* sebagai berikut: “*public choice theory asks ‘how, ‘what’, and ‘for whom’ of the public sectors just as supply and demand theory examines choices for the private sectors*”.

Batasan yang lebih sederhana dikemukakan oleh Caporaso & Levine², yang mengartikan *public choice* sebagai penerapan metode-metode ekonomi terhadap politik. Batasan tersebut sejalan dengan pendapat Buchanan³ yang mengatakan bahwa teori *public choice* menggunakan alat-alat atau metode yang telah dikembangkan ke dalam teori-teori ekonomi dan diaplikasikan ke sektor politik (pemerintah, ilmu politik, dan ekonomi publik).

Bagi Buchanan, teori *public choice* bukan metode dalam arti biasa, juga bukan seperangkat alat analisis, melainkan sebuah perspektif untuk bidang politik. Perspektif ini muncul dari pengembangan dan pengapli-

¹ Staniland, Martin. 1985. *What is Political Economy?* New Heaven: Yale University Press

² Caparoso, J.A. & D.V. Levine. 1992. *Theories of Political Economy*. New York: Cambridge University Press

³ Buchanan, James. 1989. *Essays on Political Economy*. Honolulu: University of Hawaii Press.

kasian perangkat dan metode ilmu ekonomi terhadap proses pengambilan keputusan kolektif dan berbagai fenomena-fenomena yang bersifat non pasar. Lebih tegas dijelaskan bahwa *public choice* adalah “*the economic study of non-market decision making*”.

Teori *public choice* dapat digunakan untuk mempelajari perilaku para aktor politik maupun sebagai petunjuk bagi pengambil keputusan dalam penentuan pilihan kebijakan publik yang paling efektif. Yang menjadi subjek telaah *public choice* adalah pemilih, partai politik, politisi, birokrat, dan kelompok kepentingan, secara tradisional lebih banyak dipelajari oleh pakar-pakar politik.

B. Perspektif *Public Choice*

Buchanan⁴ menerangkan bahwa konsep *public choice* tidak sebagai teori yang sempit, melainkan sebagai sebuah perspektif. Disebut sebagai “perspektif *public choice*” adalah agar dalam pembahasan dan pemberian makna terhadap konsep *public choice* bisa membantu para analis untuk memperoleh fokus pada catatan umum tentang konsep ini.

Public choice adalah sebuah perspektif untuk bidang politik yang muncul dari pengembangan dan penerapan perangkat dan metode ilmu ekonomi terhadap proses pengambilan keputusan kolektif dan berbagai fenomena non pasar. Tetapi diakui bahwa keterangan ini tidak cukup memberi deskripsi yang lengkap karena untuk mencapai suatu pers-

pektif bagi politik seperti ini diperlukan pendekatan ekonomi tertentu. Dalam hal ini apa yang seharusnya dilakukan oleh ilmu ekonomi? Untuk menjawab masalah tersebut, Buchanan mengembangkan paradigma ilmu ekonomi dalam konsep “*Catallaxy*”, yakni ekonomi sebagai ilmu pertukaran. Ekonomi seharusnya memaksimalkan kekayaan paradigmanya dari tempat dominannya selama ini sehingga definisi disiplin ilmu ini tidak hanya dalam kerangka atau terminologi hambatan kelangkaan sumber-sumber ekonomi saja. Kita dapat mengubah definisi menjadi lebih luas dan kuat dengan menghentikan kegalauan terhadap makna disiplin ilmu hanya untuk melihat optimasi alokasi sumber-sumber ekonomi yang langka. Menurut Buchanan, ekonomi perlu mulai memberi makna dan mengaplikasikan disiplin ilmu sesuai asalnya dengan konsentrasi pada akar filosofi, ‘*properties*’, dan lembaga pertukaran (*institutions of exchange*). Apa yang perlu dianalisis Adam Smith tentang barter dan pertukaran bisa menjadi titik tanjak atau langkah awal untuk memulai pengembangan instrumen ilmu ekonomi untuk bidang-bidang, yang sangat erat terkait (bidang politik, sosial dan budaya).

Pendekatan terhadap ekonomi, yang disebut sebagai “*catallaxy*” sebenarnya telah dimulai oleh para pemikir abad ke XIX. Yang terbaru misalnya dari F.A.Hayek⁵, yang menyarankan terminologi “*catallaxy*”, sebagai suatu pendekatan terhadap ekonomi sebagai subyek

⁴ *Ibid*

⁵ Hayek, F.A. 1944. *The Road to Serfdom*. Chicago: University of Chicago Press.

pencairan dan gambaran perhatian langsung terhadap proses pertukaran (*process of exchange*), perdagangan, atau perjanjian terhadap kontrak (*agreement to contract*). Ini betul-betul memperkenalkan prinsip tatanan spontanitas (*spontaneous order*) atau koordinasi spontan (*spontaneous coordination*), yang dianggap sebagai prinsip paling riil di dalam teori ilmu ekonomi.

Jika kita mengambil pendekatan “*Catallactics*” secara serius, kita lebih lanjut telah membawanya kedalam analisis yang kompleks sebagaimana pertukaran yang sederhana. Dengan demikian, pertukaran yang kompleks tersebut didefinisikan sebagai suatu proses ‘*contractual agreement*’, yang lebih jauh maknanya dari pada sekedar pertukaran dua orang yang melakukan transaksi. Penekanan akhirnya bergeser langsung ke arah semua proses perjanjian atau konsensus sukarela antara banyak orang.

Dasar-dasar filosofi seperti ini bisa menjadi alternatif dari dasar-dasar paradigma ilmu politik, yang berbasis pada analisis tentang kekuasaan (*power game*). Transformasi ke arah paradigma yang lebih bersifat *voluntary* sangat tepat sebagai alternatif paradigma baru bagi politik atau ilmu politik sehingga proses politik menjadi lebih lunak, berbasis kesukarelaan atas dasar konstitusi dan aturan, serta tidak didominasi oleh masalah kekuasaan.

Dari pergeseran dalam perspektif bagaimana ilmu ekonomi seharusnya, kemudian ada perbedaan antara ekonomi sebagai disiplin ilmu dan ilmu politik. Tidak ada garis pemisah sebenarnya antara substansi ekonomi dan politik, antara pasar dan

pemerintah (*market and government*), antara pribadi dan publik. Para ekonomi tidak seharusnya kaku dalam penelaahan terhadap sikap orang-orang didalam pasar untuk membeli dan menjual komoditi seperti itu.

Dengan pendekatan yang lebih luas melalui pendekatan ‘*catallactic*’, ekonomi dapat melihat politik dan proses politik dalam suatu terminologi paradigma pertukaran. Sepanjang tindakan kolektif dimodelkan dengan individu pengambil keputusan sebagai unit dasar dan sepanjang tindakan kolektif dilihat untuk merefleksikan pertukaran yang kompleks (*complex exchange*) atau ‘*agreement*’ antara anggota-anggota yang relevan, maka tindakan tersebut bisa dimasukkan dalam lingkup ‘*catallaxy*’. Tidak ada ‘*imperialisme*’ sebagai *catallaxy* dengan ilmu politik atau politik. Dalam ilmu politik atau politik, pandangan yang dominan lebih melihat seluruh kenyataan bukan sebagai hubungan kesukarelaan antar orang-orang. Proses politik akhirnya tidak lagi merupakan permainan kekuasaan. Hubungan pelaku-pelaku di dalamnya lebih merupakan keterlibatan kekuasaan atau pemaksaan. Pemisahan yang sama terjadi pada ilmu sosial lainnya, yaitu ilmu politik dan ilmu sosial.

Memang dalam kebanyakan hubungan nyata antara orang-orang akan selalu melibatkan elemen *catallactic* dan kekuasaan. Tatanan ideal dari persaingan sempurna didefinisikan di dalam bagian untuk tujuan mendeskripsikan, situasi dimana tidak ada kekuasaan atau tidak seorang pun berpengaruh terhadap lainnya. Masing-masing pembeli mengkonfrontasi banyak penjual sehingga memung-

kinkan penjual menggeser lebih murah komoditinya dan masing-masing penjual mengkonfrontasi banyak pembeli sehingga tidak ada kekuatan seseorang terhadap lainnya. Tetapi dalam *setting* seperti ini, ilmu ekonomi menurut Buchanan secara total tidak akan bermakna banyak dan kurang berisi.

Dalam menerapkan perspektif '*catallaxy*' atau mengimplementasikan perspektif *public choice*, kita tidak seharusnya atau tidak perlu membuat kesalahan dalam menyorot dan menyarankan bahwa elemen kekuasaan dalam hubungan politik adalah pemerasan (*squeezing*). Perspektif *public choice* yang tidak memodelkan politik dan proses politik secara eksklusif atau bahkan yang utama adalah dapat dikurangi terhadap pertukan kompleks, kontrak dan '*agreement*'. Dalam hal ini perspektif *public choice* terhadap politik menjadi analog bagi perspektif kekuatan ekonomi terhadap pasar.

Tetapi ada implikasi normatif yang perlu diderivasi perspektif *public choice* terhadap politik, yakni implikasi bahwa pada gilirannya membawa mereka menuju sebuah pendekatan terhadap reformasi kelembagaan. Pertukaran sukarela diantara orang-orang dinilai positif, sementara pemaksaan dinilai negatif. Implikasi yang timbul bahwa fakta yang pertama lebih disukai dari pada fakta yang kedua. Implikasi ini membuat kepercayaan normatif bagi produktivitas kelompok ekonomi *public choice* untuk lebih menyukai tatanan seperti transaksi pasar dimana terdapat kemungkinan untuk lebih menyukai desentralisasi kewenangan dari pada kekuasaan politik.

Dengan demikian, ekonomi *public choice* lebih memusatkan perhatian pada pendekatan untuk melakukan reformasi yang timbul dari perspektif kekuasaan. Kenyataannya, interaksi politik diantara orang-orang dimodelkan sebagai sebuah pertukaran yang kompleks, dimana inputnya adalah evaluasi atau preferensi individu. Proses itu sendiri yang dilihat sebagai alat yang memungkinkan penyebaran preferensi dikombinasikan ke dalam pola atau keluaran (*output*). Bagaimana kemudian memperbaiki pasar? Seseorang bisa menyarankan dengan memfasilitasi proses pertukaran tersebut dengan melakukan reorganisasi aturan-aturan perdagangan, kontrak dan '*agreement*'. Yang lainnya tidak mereformasi proses pertukaran yang seperti pasar oleh sebuah '*arbitrary arrangement*' dari keluaran final.

Perspektif konstitusional, suatu konsep baru yang penting, kemudian muncul dari paradigma politik sebagai sebuah pertukaran (*politic-as-exchange*). Untuk memperbaiki politik, maka penting untuk melakukan reformasi aturan atau kerangka dasar dimana permainan politik dilakukan atas dasar falsafah, yang bersifat kesukarelaan. Permainan diterangkan oleh aturannya dan permainan yang lebih baik dibuat jika hanya ada perubahan aturan. Di dalam perspektif konstitusional, terkuak hal yang merupakan bagian inklusif dari perspektif *public choice*.

C. Perkembangan dan Aplikasi Perspektif *Public Choice*

Atas dasar 'kecelakaan' yang terjadi dalam perkembangan ilmu-ilmu sosial

(ekonomi, sosial dan politik) maka ada usaha sekelompok ekonom untuk melangkah lebih jauh dalam melihat kelembagaan non pasar dalam kerangka *welfare economics*. Kerangka teori baru ini berusaha melihat fenomena pemerintah sebagai aktor didalam bidang politik dan ekonomi atau sikap individu dalam memilih wakil-wakilnya di parlemen. Dalam dekade 1980-an, khasanah literatur politik kemudian dipenuhi oleh tulisan tentang *rational choice* (RC) atau *public choice* (PC).

Yang pertama (*rational choice*) disebutkan dengan kutipan: Analogi permintaan dan penawaran komoditi sesuai hukum ekonomi klasik menjadi dasar dan kerangka pemikiran PC dalam merambah bidang-bidang sosial dan politik. Pemilih dalam hubungan yang lebih demokratis bisa dianggap sebagai konsumen, yang meminta komoditi publik, yang seharusnya disediakan oleh politisi atau pemerintah, yang memenangkan pemilu karena dukungan para pemilih. Dengan analogi tersebut, pemerintah bisa diasumsikan sebagai *supplier*, yang bisa menyediakan komoditi publik untuk masyarakat.

Yang kedua, *public choice* sangat tertuju perhatiannya terhadap fungsi pelihan sosial atau eksplorasi terhadap kepemilikan kesejahteraan sosial (*properties of social welfare*). Analisa *public choice* terarah pada masalah agregasi preferensi individu untuk memaksimalkan fungsi kesejahteraan sosial tadi atau memuaskan seperangkat kriteria normatif. Gambaran dasar pendekatan *public choice* adalah penekanan dalam menilai keputusan rasional, baik oleh individu anggota masyarakat, warga negara

maupun keputusan rasional pemerintah.

Pendekatan ini tidak menolak kemungkinan kepentingan kolektif atau tindakan kolektif, tetapi semuanya (sebagai pandangan Adam Smith) merupakan *resultante* dari segenap kepentingan individu yang ada di dalamnya. *Public choice* juga tidak menolak eksistensi politik, tetapi mengasumsikan bahwa watak politik dan kelembagaannya dapat dianalisis secara analog sebagaimana sikap ekonomi individu dan watak pasar di dalam kerangka analisa ekonomi.

Dengan demikian, para ekonom mulai merambah wilayah baru di luar bidang ekonomi dengan perspektif *public choice* sebagai jembatan yang bisa menganalisis masalah di luar kerangka analisis yang bertumpu pada fenomena pasar. Inilah yang memungkinkan pertemuan kembali bidang ekonomi dan politik dalam satu wilayah analisis sehingga perkembangan ilmu-ilmu sosial dimasa mendatang tidak lagi tersekat dalam kotak-kotak disiplin ilmu yang ketat, saling menafikan dan tidak saling menguatkan satu sama lain. Akibat keterpisahan disiplin ilmu ini, maka ilmu sosial menghadapi krisis besar karena banyak fenomena baru, yang tidak bisa ditangkap secara sempurna oleh dua kelompok ilmuwan tersebut.

Pendekatan ini bisa berdimensi teoritis tetapi juga mempunyai preskripsi aplikasi sehingga bisa menjadi referensi kebijakan publik atau bahan yang bermanfaat di dunia akademis. *Public choice* bisa dipakai untuk menunjukkan bagaimana sikap (*behaviour*), yang diinterpretasikan sesuai medium budaya dan ideologi yang ada dan sangat mudah diterangkan

sebagai ekspresi dan persepsi individu terhadap kepentingannya. Pendekatan ini juga bisa digunakan untuk mengiluminasikan kondisi keberhasilan tindakan kolektif dan untuk menunjukkan mengapa sebagian kepentingan bisa lebih diintegrasikan dan sebagian lainnya tidak.

Dengan pendekatan pilihan publik tidak ada lagi sekat-sekat

pemisah antara ekonomi dan politik, antara pasar dan pemerintah, antara pribadi dan masyarakat publik. Dalam model pilihan publik, ekonomi diperluas mencakup politik, pasar diperluas mencakup pemerintah, dan pribadi. Hal ini terlihat dari perbandingan paradigma pada Tabel 1 berikut ini.

Tabel 1. Perbandingan Paradigma Ekonomi Klasik dan Public Choice

Ekonomi Klasik	Public Choice
1. Suplai produsen, pengusaha, distributor	1. Politisi, partai politis, birokrasi pemerintah
2. Komoditi individu (<i>private goods</i>)	2. Komoditi publik (<i>public goods</i>)
3. Medium transaksi uang	3. Suara (<i>votes</i>)
4. Demand konsumen	4. Pemilih (<i>voters</i>)
5. Transaksi <i>voluntary</i> (<i>sukarela</i>)	5. Politik <i>as exchange</i>

Dengan demikian, *public choice* bisa menjadi petunjuk bagi pengambil keputusan untuk menentukan pilihan kebijakan yang paling efektif. *Public choice* sangat erat kaitannya dengan pemilih, partai politik, politisi, birokrat, kelompok kepentingan, dan aturan pemilihan umum. Semua ini biasanya dikaitkan dengan ilmu politik tetapi pada saat ini para ahli ilmu ekonomi politik mengembangkan pendekatan baru yang disebut *public choice* tersebut. Jadi *public choice* bukan suatu objek studi tetapi sebuah cara untuk menelaah subyek, yang secara defenitif diartikan sebagai *the economic study of non market decision making*.

Partai politik, pemilih, birokrat, politisi, dan kelompok kepentingan adalah subyek yang menjadi wilayah telaah ilmu politik. *Public choice*, sebagai sebuah pendekatan yang menggunakan asumsi dasar ilmu ekonomi, mulai berhasil merambah

wilayah-wilayah baru ini sehingga kelahiran pendekatan ini dianggap sebagai terobosan baru dibidang ilmu-ilmu sosial. Bahkan tokohnya, James Buchanan, mendapat anugerah hadiah Nobel di bidang ekonomi karena berhasil melakukan pendekatan baru yang tidak konvensional sebagaimana ahli ilmu ekonomi dan ahli ilmu politik umumnya.

Pendekatan ini akhirnya menjadi alat ilmu ekonomi untuk menelaah apa-apa yang dulu menjadi obyek telaah ilmu politik. Logika yang diterapkan bersifat penalaran deduktif dimana ahli ilmu ekonomi politik ini menelusuri watak dan sikap aktor-aktor yang rasional – seperti konsumen, pemilih, politisi, dan pengusaha – untuk memaksimalkan peluang yang dimilikinya dalam rangka memenuhi keinginannya. Dari pendekatan ini mereka – sebagai aktor yang rasional – dapat mengkonstruksikan sebuah gambaran yang terelaborasi dari suatu

ekonomi yang akan terjadi jika setiap individu bertindak rasional. Pengambilan keputusan dengan basis teoritis ini bisa membuat prediksi yang lebih pasti dan kebijakan dengan dasar ilmiah yang lebih panjang ke depan.

Menurut Mclean⁶, ekonomi biasanya hanya bersentuhan dengan pilihan swasta dan individu. Jika seorang individu suka jeruk, maka tidak perlu keterlibatan pemerintah untuk melakukan kontrol atas suplai jeruk dalam masyarakat. Teori ekonomi dapat menerangkan dengan jelas bagaimana seorang individu dapat memperoleh jeruk di pasar atas dasar hukum permintaan dan penawaran. Ribuan atau jutaan konsumen dan penjualnya melakukan transaksi secara bebas di pasar sehingga terbentuk harga sesuai dengan kekuatan permintaan dan penawaran tersebut.

Jeruk yang dikonsumsi individu tersebut adalah komoditi ekonomi individual biasa (*private goods*), yang bisa dilihat dalam dua bentuk pandangan yang berbeda. *Pertama*, pemerintah tidak terlibat dan tidak melakukan intervensi pasar jeruk tersebut. Pemerintah mungkin terlibat tetapi tidak seharusnya melakukan intervensi. *Kedua*, keputusan yang diambil individu untuk membeli jeruk tidak menimbulkan dampak biaya dan keuntungan bagi individu lainnya di dalam masyarakat.

Hal yang penting adalah perbedaan komoditi ekonomi individu biasa dengan komoditi publik, yang dampaknya berbeda jika kita mengambil tindakan untuk mengkonsumsi-

nya dalam jumlah tertentu. Konsumsi terhadap komoditi publik akan memberikan dampak terhadap individu yang ada didalamnya, berkaitan dan bersentuhan dengan komoditi tersebut, misalnya air irigasi, perairan untuk nelayan, dan sebagainya. Setiap keputusan untuk mengkonsumsi komoditi ekonomi individu biasa tidak mempunyai dampak terhadap individu lainnya. Sebaliknya, setiap pengambilan keputusan untuk mengkonsumsi komoditi publik akan berdampak nyata terhadap individu dalam masyarakat sehingga sering menuntut peranan atau intervensi pemerintah di dalam proses pengambilan keputusan tersebut.

Jika pemerintah mengambil keputusan untuk melakukan intervensi terhadap pasar yang sudah sempurna di pasar jeruk seperti dicontohkan tadi, maka intervensi tersebut akan menjauhkan keadaan pasar yang sudah membaik dan harga yang terbentuk justru tidak ideal karena dibuat secara artifisial. Masalah yang bersifat teknis, yang seharusnya diselesaikan di pasar, akhirnya bergeser karena politik, yang konsekuensinya akan diterima secara tidak seimbang oleh individu-individu yang seharusnya melakukan transaksi di dalam pasar jeruk tersebut.

Keputusan menentukan status, konsumsi, dan pemanfaatan komoditi publik sering harus melibatkan pemerintah sehingga institusi nonpasar terpaksa ikut dalam pemanfaatan komoditi politik. Keputusan menerapkan Undang-Undang pemanfaatan perairan nelayan atau UU kebersihan lingkungan adalah tindakan yang diikuti oleh banyak pelaku di luar

⁶ Mclean. 1989. *Public Choice: An Introduction*. New York: Basil and Blackwell .

konsumen dan produsen tidak seperti terjadi dalam transaksi komoditi ekonomi swasta. Proses tersebut perlu melibatkan institusi nonpasar sebab akan melibatkan politisi, kelompok kepentingan, dan sebagainya.

Fenomena seperti ini akhirnya bisa dikemas dalam kerangka analisa *public choice* karena proses tersebut lebih merupakan keputusan ekonomi. Tetapi analisis yang bisa digunakan adalah alat ekonomi sebagaimana terjadi di dalam pengambilan keputusan di dalam transaksi pasar. Kita dapat melihat politisi sebagai *entrepreneur* atau produsen, yang menawarkan secara terbaik untuk mengkonsumsi komoditi publik, dan masyarakat pemilih sebagai konsumen, yang akan memanfaatkan dan mengkonsumsi komoditi publik tersebut.

Popkin⁷, yang telah berhasil memakai pendekatan *rational choice* di dalam risetnya tentang petani rasional di Vietnam, menilai bahwa pendekatan tersebut merupakan jembatan untuk mempertemukan ekonomi dan ahli ilmu sosial lainnya. Pemisahan ilmu ekonomi dan ilmu-ilmu sosial lainnya adalah kesalahan para ekonom masa lampau yang tidak pernah mau melihat fenomena, transaksi, dan penataan nonpasar (*nonmarket institution and nonmarket arrangements*). Ekonomi pasar sesungguhnya memberikan alat yang elegan bagi para ekonom untuk menerangkan dan memberikan dasar

teoritis bagi kebijakan ekonomi, tetapi para ekonom tidak pernah memperhatikan peran ekonomi dari lembaga nonpasar. Afinitas alamiah muncul antara *public choice* dan studi tentang masyarakat petani.

Dalam kasus studi Popkin, *public choice* dapat dipakai sebagai studi terhadap institusi ekonomi nonpasar dan perluasan dari metodologi ekonomi mikro terhadap institusi nonpasar tersebut dalam tatanan nonpasar. Karena studi Popkin tentang petani tertuju pada analisis dan desain institusi bukan pasar, maka *public choice* menjadi jembatan antara ekonom dalam menerapkan model rasional dari individu-individu yang terlibat di dalam pasar dengan ahli ilmu sosial, yang mempunyai asumsi ekonomi tentang alokasi sumberdaya yang terbatas tetapi tidak aplikatif terhadap studi mereka untuk institusi pedesaan. Dengan menggunakan pendekatan ini, maka ekonomi dan ilmuwan sosial lainnya mempunyai wilayah yang sama dengan alat analisis yang bisa dipertemukan sehingga fenomena dan obyek studi yang ada biasa digambarkan secara lebih komprehensif dan lebih memadai.

I D. Penutup

Bagaimana pun *public choice* (PC) atau *rational choice* (RC) juga mendapat kritik dan dinilai sebagai pendekatan yang naif karena terlalu mempertimbangkan bahwa tindakan individu hanya bertumpu pada sisi rasionalitas individu saja sehingga mengesampingkan kekayaan lembaga, budaya dan politik masyarakat. Karena pendekatan PC mengab-

⁷ Popkin, Samuel. 1989. "Public Choice and Peasant Organization", dalam Robert H. Bates (ed.), *Toward a Political Economy of Development: A Rational Choice Perspective*. Berkeley: University of California Press.

straksikan pengambilan keputusan individu dari pengaruh sosial yang irasional yang menganggap masyarakat dan budaya adalah *given*, maka pendekatan ini tidak bisa melihat kreasi secara, perubahan preferensi, dan proses pengambilan keputusan individu yang sebenarnya bersifat sangat irasional bahkan intuitif.

Jawaban ahli PC atau RC terhadap kritik tersebut adalah bahwa pendekatan ini memang tidak dimaksudkan untuk melihat hal-hal seperti itu. Karena pendekatannya adalah deduktif, maka PC atau RC tidak bisa dilihat atau dijustifikasi semata-mata oleh pendekatan deduktif. Pendekatan RC lebih diutamakan untuk menjawab pertanyaan tentang hubungan antara ekonomi dan politik dan ilmu ekonomi, yang selama ini masih gelap karena keduanya berkembang terpisah satu sama lain, tidak bersentuhan dan bergerak menuju arah yang saling menjauh. Kerangka analisa RC bukan dimaksudkan untuk menjawab semua persoalan yang ada tetapi karena caranya yang baru sama sekali pasti bisa mensintesisakan pertemuan antara ilmu politik dan ilmu ekonomi. Bagaimana pun pendekatan yang segar terhadap konservatisme ilmu ekonomi dan politik hendak dipecahkan dengan mengajukan pendekatan baru *public choice* dan *rational choice* ini.

Pertanyaan lain terhadap pendekatan *rational choice* ini: adakah cara pemecahan terhadap masalah hubungan antara politik dan

ekonomi atau antara dua disiplin ilmu yang sudah jauh satu sama lain, ilmu politik dan ilmu ekonomi? Jawabannya bukanlah penyelesaian masalah hubungan antara keduanya, tetapi lebih merupakan suatu cara menjadi sintesis atau mungkin suatu teori yang dapat membantu untuk memahami pengaruh mutual dan *overlapping* dari proses pertanyaan tadi. Pendekatan ini secara sederhana menerapkan bagaimana bahasa ekonomi diwujudkan ke dalam kelembagaan, dan sikap individu di dalam bidang politik. Dengan demikian, pendekatan *public choice* ini dapat memasukkan politik ke dalam arena ekonomi dimana dinamika sikap individu dan watak pemerintah bisa dideteksi dan diprediksikan secara teoritis. *Public choice* merupakan penerapan pendekatan ekonomi terhadap ilmu atau bidang politik dimana asumsi dasar di bidang ilmu ekonomi bisa diterapkan ke dalam bidang politik.

Ilmu ekonomi memberikan contoh nyata sehingga teori yang lahir relatif lebih pasti dibandingkan dengan ilmu sosial lainnya. Perambahan kerangka teori ilmu ekonomi ke dalam ilmu politik memungkinkan untuk melihat fenomena politik secara lebih pasti dan terprediksi secara teoritis. Analisis spekulatif, yang banyak muncul di kalangan ahli ilmu ekonomi, seminimal mungkin bisa dikurangi, dan kerangka pemikiran *public choice* bisa memberikan sumbangan yang berarti bagi ilmu politik.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Buchanan, James. 1989. *Essays on Political Economy*. Honolulu: University of Hawaii Press
- Caparoso, J.A. & D.V. Levine. 1992. *Theories of Political Economy*. New York: Cambridge University Press
- Hayek, F.A. 1944. *The Road to Serfdom*. Chicago: University of Chicago Press
- Mclean. 1989. *Public Choice An Introduction*. New York: Basil and Blackwell
- Popkin, Samuel. 1989. "Public Choice and Peasant Organization", dalam Robert H. Bates (ed.), *Toward a Political Economy of Development: A Rational Choice Perspective*. Berkeley: University of California Press
- Staniland, Martin. 1985. *What is Political Economy?* New Heaven: Yale University Press